



PEMUTAKHIRAN, ANALISIS DAN PEMANFAATAN DTKS KOTA CIREBON

PESAN UTAMA

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisi data dan informasi tentang sosial ekonomi dari 40% rumah tangga termiskin yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program perlindungan sosial dan sektoral di daerah.
- DTKS dapat dianalisis secara sektoral dan spasial sampai tingkat kelurahan/kelurahan yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan berbasis bukti/data di daerah.
- Secara umum, pemutakhiran DTKS di Kota Cirebon masih sangat rendah dengan prosentase perbaikan 0,12% dan belum ada usulan baru. Prediksi akurasi pemutakhiran data juga tergolong rendah.
- Sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian dan pemetaan lebih lanjut, terutama kelurahan-kelurahan dengan penduduk miskin dan rentan miskin yang cukup banyak serta jumlah anggota rumah tangga/keluarga yang besar.
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid masih cukup banyak, hampir 10% dari total individu dalam DTKS, yang dapat menghambat akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program bantuan sosial dan layanan dasar lainnya.
- Penduduk miskin dan rentan miskin dengan kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis masih ditemukan di sejumlah kelurahan.
- Mayoritas penduduk dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang perdagangan dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan swasta dan lapangan usaha bangunan/konstruksi dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas non pertanian. Sementara status pekerjaan kepala rumah tangga, mayoritas adalah pekerja bebas bangunan/konstruksi, berusaha sendiri perdagangan serta buruh jasa kemasyarakatan dan pekerja bebas jasa kemasyarakatan.
- Proporsi penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang sekaligus menerima beberapa program bansos/perlindungan sosial masih rendah, menunjukkan kecenderungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Sementara secara teoritis, kelompok termiskin seperti penerima PKH berhak sekaligus menerima Program Kartu Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Keaktifan Pemutakhiran DTKS

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang tidak aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Hingga Januari 2020, prosentase perbaikan DTKS di Kota Cirebon hanya 0,12% tanpa usulan baru, dan termasuk kategori perbaikan rendah dengan prediksi akurasi data yang juga rendah. Dengan rendahnya tingkat keaktifan ini, Kota Cirebon menduduki peringkat 393 diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam ranking verifikasi dan validasi DTKS.

Selain itu, seperti terlihat pada Gambar 1, prosentase perbaikan DTKS untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) hanya 0,11% dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebesar 14,42%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk memastikan penduduk miskin dan rentan miskin dalam DTKS menerima kedua program tersebut.

Gambar 1: Keaktifan Pemutakhiran DTKS Kabupaten/Kota s/d Januari 2020

KEAKTIFAN VERVAL KABUPATEN/KOTA S.D. JANUARI 2020							
Kode	Kabupaten/Kota	Provinsi	Presentase Perbaikan DTKS	Presentase Usulan Baru DTKS	Presentase Perbaikan BSP	Presentase Perbaikan PBI	Rangking Verval Nasional
3209	Cirebon	Jawa Barat	48,710	2,600	0,000	0,000	128
3274	Kota Cirebon	Jawa Barat	0,120	0,000	0,110	14,420	393

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 514 total entries)

Previous 1 Next

Persentase Perbaikan: **Rendah**
Prediksi Akurasi Data: **Rendah**

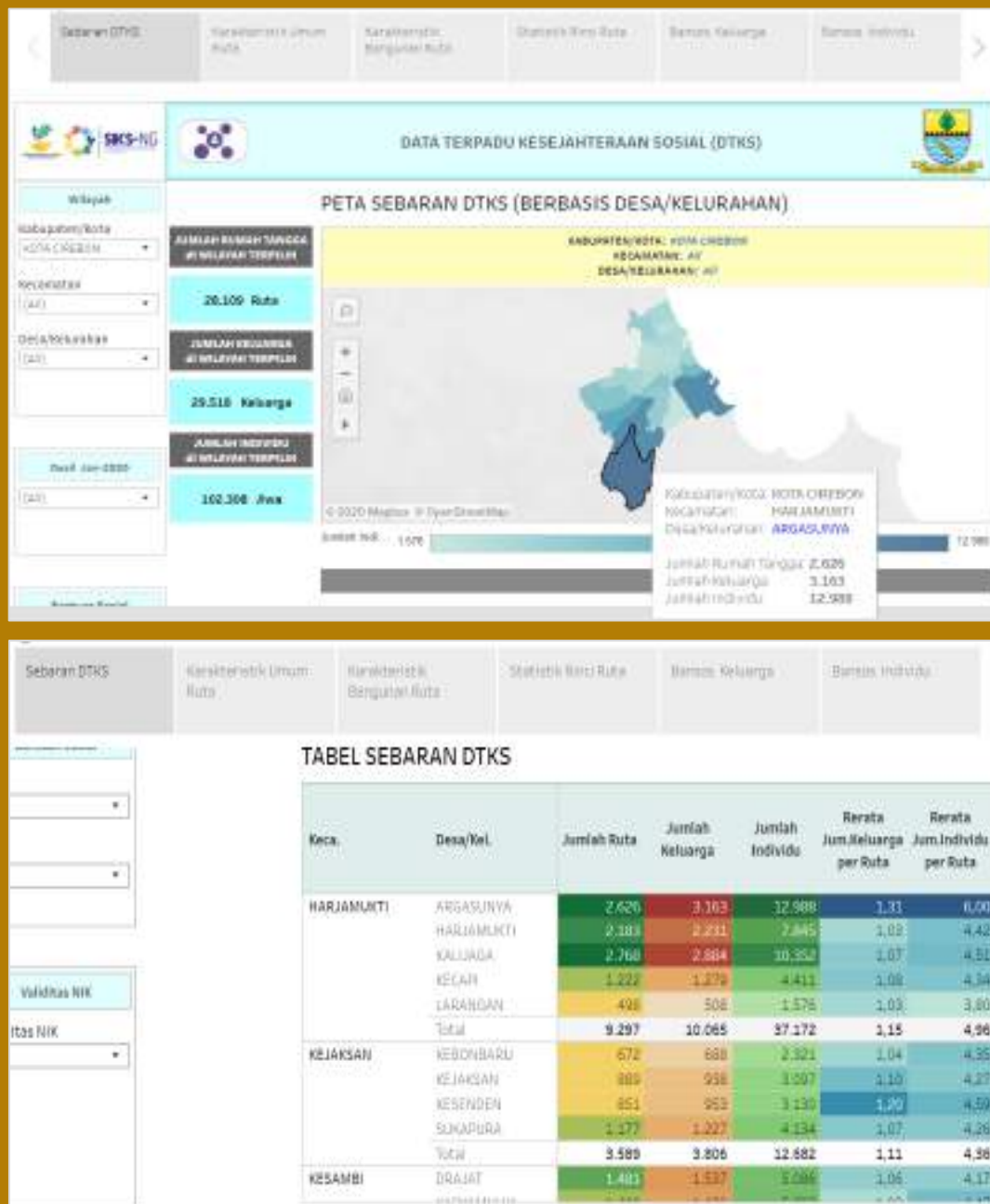
Sebaran DTKS Berbasis Kelurahan

Dalam DTKS, terdapat 102.308 jiwa atau 28.109 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kota Cirebon, tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Beberapa kelurahan yang memiliki penduduk miskin dan rentan miskin banyak, diantaranya kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti dengan 12.988 jiwa, kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk 10.585 jiwa, dan kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti 10.352 jiwa. Sementara yang paling sedikit penduduk miskin dan rentan miskinnya adalah kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti, dengan hanya 1.576 jiwa.



Pola sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Cirebon, terutama beberapa kelurahan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan miskin paling besar. Pemetaan lebih lanjut terkait tingkat kemiskinan dan kerentanan, faktor-faktor penyebab banyaknya penduduk miskin dan rentan miskin, serta potensi dan kebutuhan intervensi program di kelurahan-kelurahan tersebut perlu dilakukan.

Gambar 2:
Sebaran DTKS Berbasis Kelurahan



Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga

Selain sebaran jumlah penduduk miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan, informasi penting yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah keluarga dan individu dalam rumah tangga. Informasi ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi program dari rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan miskin.

Secara umum, rerata jumlah keluarga dan individu per rumah tangga, masing-masing sebanyak 1,09 keluarga dan 4,51 individu. Beberapa kelurahan memiliki rerata jumlah keluarga dan/atau individu per rumah tangga yang cukup besar, diantaranya Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dengan 1,31 keluarga dan 6,00 individu dalam satu rumah tangga.

Gambar 3: Rerata Jumlah Keluarga dan Individu Per Rumah Tangga Berdasarkan Kelurahan

Kec.	Desa/Kel.	Jumlah Rukoh	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rerata Jum. Keluarga per Rukoh	Rerata Jum. Individu per Rukoh
HARJAMUKTI	ARGASUNYA	2.626	3.163	12.988	1,31	6,00
	HARJAMUKTI	2.383	2.291	7.845	1,02	4,42
	KALIJADA	2.768	2.884	10.352	1,07	4,51
	KECAN	1.222	1.279	4.411	1,08	4,34
	LARANGAN	492	506	1.576	1,03	3,80
Total		9.297	10.065	37.172	1,15	4,96
KEJAKSAN	KEBONBARU	672	688	2.321	1,04	4,35
	KEJAKSAN	889	938	3.507	1,10	4,27
	KESENDEN	851	953	3.130	1,20	4,59
	SUKAPURA	1.177	1.227	4.134	1,07	4,36
Total		3.589	3.806	12.682	1,11	4,58
RESAMBI	DRAJAT	1.401	1.537	5.066	1,06	4,17

NIK Invalid (Invalid)

Salah satu faktor yang memengaruhi akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program perlindungan sosial dan layanan dasar lainnya adalah validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum terpadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Penduduk yang memiliki NIK tidak valid di Kota Cirebon masih cukup besar yaitu mencapai 9.707 jiwa atau sekitar 9.5% dari total individu dalam DTKS yang tersebar di seluruh kecamatan

dan kelurahan. Terdapat dua kelurahan yang memiliki NIK tidak valid di atas 1.000 jiwa, yaitu kelurahan Argasunya dengan 1.275 jiwa dan kelurahan Kalijaga dengan 1.055 jiwa.

Berdasarkan jenis program yang diterima, penerima Program Kartu Sembako/BPNT yang paling banyak memiliki NIK tidak valid yaitu, sebanyak 4.187 jiwa (43%) dari total NIK tidak valid, disusul penerima PKH sebanyak 1.992 jiwa (20%).

Gambar 4: Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tidak Valid berdasarkan Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah Rute	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Rerata Jns. Keluarga per Rute	Rerata Jns. Individu per Rute
HARJABUKTI	ARGASUNYA	826	871	1.275	1,41	5,74
	HALIMANUKTI	36	36	36	1,00	3,01
	KALIJAGA	720	720	1.055	1,08	3,00
	KOCAP	283	204	375	1,01	3,03
	LEMBANGAN	234	136	109	2,06	5,60
KEJAMSAN	TETAN	2.487	2.504	2.596	1,19	4,62
	KODIHEWALU	117	130	173	1,06	3,63
	KEJAMSAN	181	181	248	1,11	3,75
	KEJAMSAN	121	100	255	1,23	4,08
SUKOPURA	SUKOPURA	343	343	343	1,01	3,01
	SUKOPURA	343	343	343	1,01	3,01

Karakteristik Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga

Mayoritas kepala rumah tangga atau kepala keluarga miskin dan rentan berusia diantara 41-59 tahun mencapai setengah dari total rumah tangga atau total keluarga dalam DTGS. Sementara sekitar 30% kepala rumah tangga dan kepala keluarga berusia di atas 60 tahun.

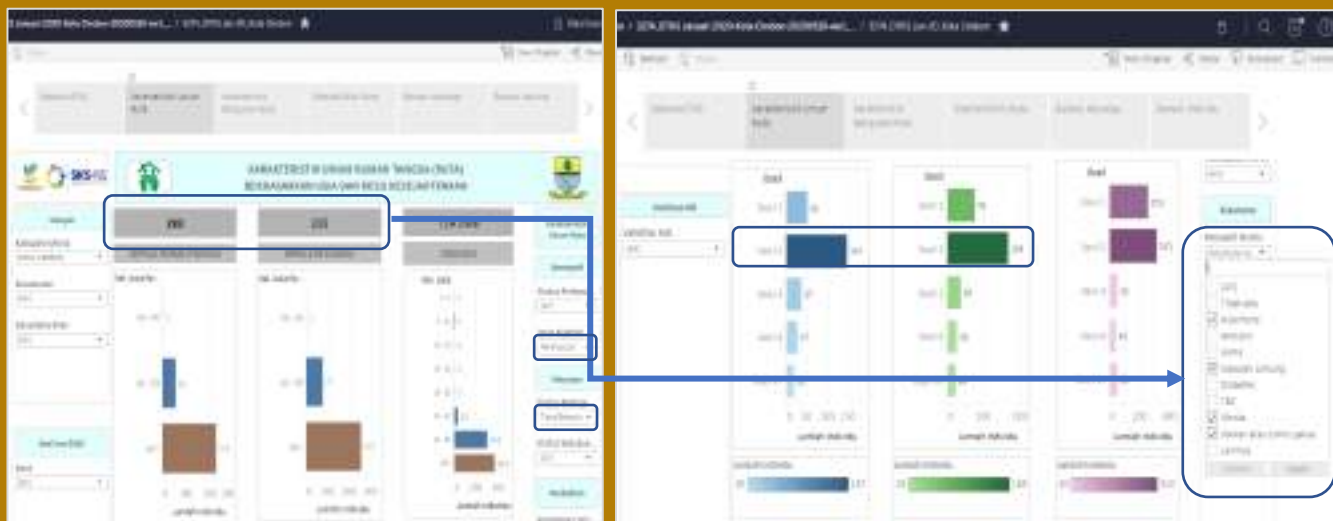
Terdapat 2.679 Kepala Rumah Tangga dan 3.166 Kepala Keluarga yang berusia di atas 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan tidak bekerja. Sebaran tertinggi Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja berada pada Desil 2.

Diantara kepala rumah tangga dan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan tidak bekerja, terdapat 283 dan 335 yang menderita penyakit kronis diantaranya hipertensi, masalah jantung, stroke, dan kanker atau tumor ganas. Seperti terlihat pada Gambar 5.b, sebagian besar dari kelompok Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga ini berada di desil 2.

Gambar 5.a: Karakteristik Umum Kepala Rumah Tangga dan Kepala Keluarga



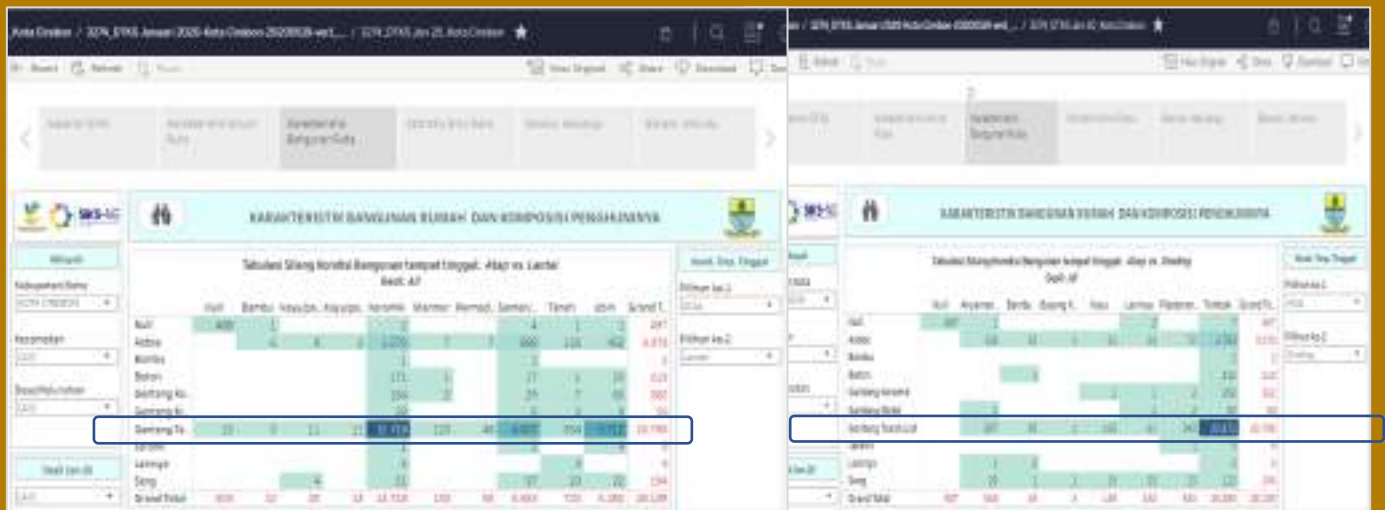
Gambar 5.b: Status Pekerjaan dan Jenis Penyakit Kepala Rumah Tangga/Kepala Keluarga



Karakteristik Bangunan Rumah Tangga

Mayoritas atap rumah penduduk yang ada di DTKS terbuat dari genteng tanah liat. Sekitar 80% diantaranya beratap genteng tanah liat dengan dinding berjenis tembok. Sementara, 45% rumah penduduk dalam DTKS beratap genteng tanah liat dengan lantai berjenis keramik, diikuti lantai ubin 20% dan lantai semen/bata merah 16%.

Gambar 6: Kondisi Bangunan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin



Karakteristik Individu dan Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas penduduk Kota Cirebon yang berada dalam DTKS mempunyai lapangan usaha di bidang perdagangan dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan swasta sebanyak 4.664 orang dan lapangan usaha bangunan/konstruksi dengan status pekerjaan sebagai pekerja bebas non pertanian sebanyak 3.754 orang

Kemudian berdasarkan status pekerjaan, kepala rumah tangga dalam DTKS, mayoritas adalah pekerja bebas bangunan/konstruksi (14%), diikuti berusaha sendiri perdagangan (10%) serta buruh jasa kemasyarakatan dan pekerja bebas jasa kemasyarakatan, masing masing 9%, dengan penghasilan maksimal diperkirakan sebesar UMK. Nilai UMK Kota Cirebon pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.219.487,67

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang lain diantaranya usaha sendiri di bidang buruh perdagangan, buruh bangunan/konstruksi serta berusaha sendiri transportasi dan pergudangan, masing masing sebesar 6%.

Gambar 7a: Status Pekerjaan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin

Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan								
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan Swasta	PNS/BUM N/BUMD	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	Grand Total
Pertanian tanaman padi & palawija	34	5	3	70		74	37	14	237
Hortikultura				5		2	4		11
Perkebunan	3			13		4	5		25
Perikanan tangkap	93		2	276		10	59	6	446
Perikanan budidaya	7	2		11		1	4	1	26
Peternakan	72	24		58		5	18	44	221
Kehutanan & pertanian lainnya	1			9	1				11
Pertambangan/penggalian	39			70			213		322
Industri pengolahan	201	20	7	1359	1	1	126	26	1741
Listrik dan gas	25		1	128	1		18	1	174
Bangunan/konstruksi	452		5	1800		7	3754	6	6024
Perdagangan	3312	216	27	4664	1	2	569	348	9139
Hotel & rumah makan	1275	166	15	892			110	250	2708
Transportasi & pergudangan	1130	2	10	1191	7	1	1101	5	3447
Informasi & komunikasi	11			120	1		15		147
Kuangan & asuransi	6			229	4		5		244
Jasa pendidikan	25			321	14	1	45	2	408
Jasa kesehatan	14			176	2		14		206
Jasa kemasyarakatan. pemerintah	817	9	10	3556	20	6	2857	36	7311
Pemulung	146	3		11		1	168	8	337
Lainnya	65		1	328	1		307	11	713
Grand Total	7728	447	81	15287	53	115	9429	758	33899

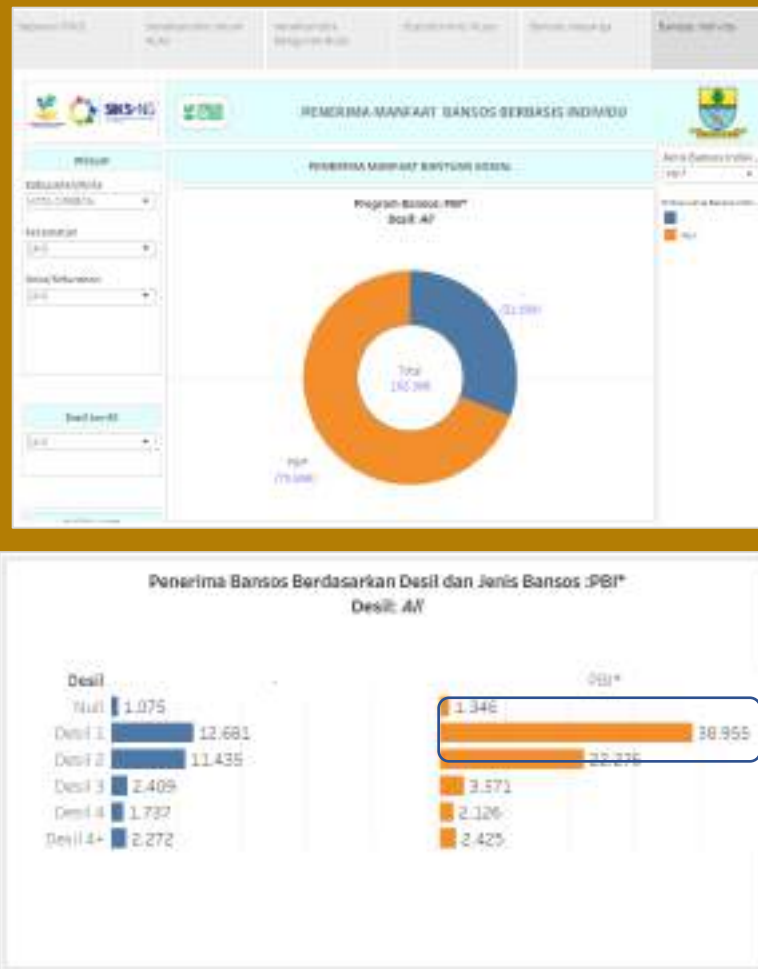
Gambar 7b: Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin

Lapangan usaha ART	Status kedudukan pekerjaan								
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan Swasta	PNS/BUM N/BUMD	Pekerja Bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja keluarga	Grand Total
Pertanian tanaman padi & palawija	27	5	3	47		56	23	2	163
Hortikultura				3		2	3		8
Perkebunan	3			9		2	3		17
Perikanan tangkap	84		2	126		5	39	4	260
Perikanan budidaya	5	1		7		1	3		17
Peternakan	53	13		26		2	11	1	106
Kehutanan & pertanian lainnya	1			4	1				6
Pertambangan/penggalian	36			46			161		243
Industri pengolahan	128	11	5	484	1	1	44	1	675
Listrik dan gas	21			69			12		102
Bangunan/konstruksi	444		5	1147		2	2439	2	4039
Perdagangan	1823	108	20	1150	1	2	224	9	3337
Hotel & rumah makan	661	103	6	223			34	11	1038
Transportasi & pergudangan	1042	2	8	821	1	1	909		2784
Informasi & komunikasi	7			31			11		49
Kuangan & asuransi	5			56	2		2		65
Jasa pendidikan	23			114	4	1	20	2	164
Jasa kesehatan	11			46	1		4		62
Jasa kemasyarakatan. pemerintah	692	6	7	1680	3	3	1632	5	4028
Pemulung	92	3		7		1	99	3	205
Lainnya	54		1	162			155	6	378
Grand Total	5212	252	57	6258	14	79	5828	46	17746

Komplementaritas Bantuan Sosial (Bansos)

Gambar 8a dan 8b menyajikan proporsi penerima dan komplementaritas program bantuan sosial di tingkat Kota Cirebon. Dari total 102.308 jiwa yang ada di DTKS, sebanyak 70.699 jiwa jiwa atau sekitar 69% sebagai PBI JK. Mayoritas PBI JK tersebar di desil 1 dan 2, masing-masing 38.955 dan 22.276 jiwa.

Gambar 8a: PBI-JK Berdasarkan Desil

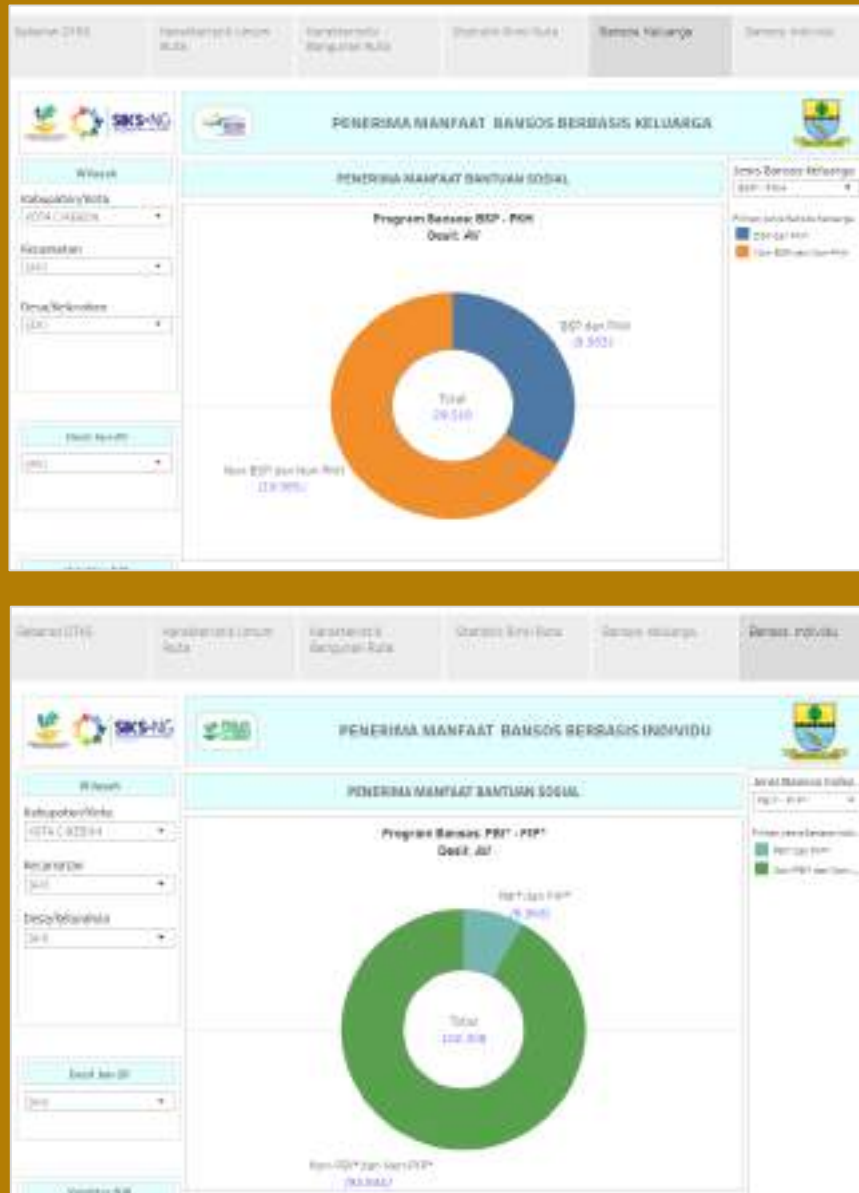


Proporsi penduduk miskin dan rentan yang menerima lebih dari satu program sekaligus memiliki kecendrungan serupa dengan yang ada di tingkat nasional. Seperti terlihat pada gambar 8b, sekitar 34% keluarga dalam DTKS di Kota Cirebon menerima PKH dan BSP sekaligus. Dari total 9.953 keluarga penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 1 dan desil 2, masing-masing sebanyak 7.376 keluarga (74%) dan 1.882 keluarga (19%).

Sementara, individu dalam DTKS yang menerima PBI dan PIP sekaligus hanya 8%. Dari total 8.363 jiwa penerima kedua program ini, mayoritas berada di desil 1 dan desil 2, masing masing sebanyak 5.772 jiwa (69%) dan 1.997 jiwa (24%).

Secara teoritis, seluruh penerima PKH sebagai kelompok termiskin berhak menerima BSP dan PBI sekaligus. Penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah juga seharusnya menerima PIP.

Gambar 8b: Komplementaritas Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga dan Individu





REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Pemerintah Kota Cirebon perlu aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara periodik sesuai pedoman pemutakhiran data yang telah disiapkan dan disepakati dengan pemerintah pusat melalui Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI.
- Pemerintah Kota Cirebon perlu memanfaatkan DTKS secara lebih luas untuk mendukung perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan program sektoral di daerah. Tool Dashboard Business Intelligence DTKS yang telah dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI dapat digunakan untuk ini.
- Pemerintah Kota Cirebon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu melakukan pendalaman atas pemetaan dan beberapa temuan di atas dengan melibatkan sumberdaya manusia yang ada di daerah seperti fasilitator SLRT-Puskesmas, potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan pendamping kelurahan.
- Pemerintah Kota Cirebon perlu memastikan penerimaan program perlindungan sosial, baik program pusat maupun daerah termasuk yang dikelola oleh pihak non pemerintah, terutama di kelurahan yang jumlah penduduk miskin dan rentan miskinnya besar.
- Pemerintah Kota Cirebon perlu memperkuat mekanisme pemantuan program perlindungan sosial dan penanganan keluhan warga sampai tingkat kelurahan sehingga permasalahan terkait program-program perlindungan sosial dapat ditangani segera dengan baik.
- Pemerintah Kota Cirebon dapat memberikan intervensi berupa program bantuan sosial yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lain seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan kelompok filantropis lainnya, kepada rumah tangga dalam DTKS yang tidak menerima program bantuan sosial.
- Pemerintah Kota Cirebon perlu memastikan kelompok yang paling rentan seperti kepala keluarga perempuan berusia di atas 60 tahun yang tidak bekerja dan menderita penyakit kronis menerima bantuan sosial dan/atau layanan kesehatan.
- Berdasarkan pemetaan melalui analisis komplementaritas program perlindungan sosial, Pemerintah Kota Cirebon perlu memastikan kelompok termiskin seperti penerima PKH sekaligus dapat menerima PBI JK dan Program Kartu Sembako atau program sejenis yang dikelola pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- Pemerintah Kota Cirebon perlu melakukan pemutakhiran data untuk Program Kartu Sembako dan PBI JK dan melalui kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil untuk memperbaiki NIK tidak valid yang jumlahnya masih cukup besar.